

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah permasalahan semua bangsa. Berkaitan dengan masalah kemiskinan bangsa Indonesia merasa perlu mencantumkan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara. Isi pasal tersebut menyebutkan tentang jaminan Negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar (UUD 1945 pasal 34). Dari pasal inilah program-program pengentasan kemiskinan dicanangkan. Walaupun demikian, kondisi dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Data dari Badan Pusat Statistik (2003) menunjukkan, bahwa krisis ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 38,39 juta dan 16,5 juta atau 43% dari penduduk miskin adalah fakir miskin.

Dari krisis ekonomi, selain kemiskinan ternyata memberikan pelajaran lain kepada para pakar ekonomi. Sebagaimana data Menteri Negara Koperasi setelah krisis ekonomi (2004), menunjukkan dari 42,452 juta *entitas* usaha, ternyata 41,8 juta atau 98,5% adalah usaha mikro. Hanya 650 ribu yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah, serta dua ribu lainnya adalah usaha besar. Ini membuktikan sektor usaha mikro dan UKM-lah yang paling berjasa dalam penyelamatan perekonomian, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Hal tersebut dikuatkan pula oleh studi tentang upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (Wirjo, 2005). Studi tersebut menunjukkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, salah satunya dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro. Disamping itu ternyata Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan.

Disinilah posisi strategis lembaga keuangan mikro sebagai *mediator* dalam pengentasan kemiskinan. Pengakuan tersebut tercermin dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB ke-53 tahun 1998 (Warta UMKM, 2005) yang menetapkan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro Internasional (TKMI).

Sebenarnya keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia sudah sejak lama. Jumlah lembaga keuangan mikro tercatat 48.610 unit kantor tersebar di seluruh pelosok Indonesia baik yang berbadan hukum bank maupun non bank (Republika, 2005). Sehingga Robinson dalam bukunya mengatakan bahwa Indonesia adalah rumah bagi sistem lembaga keuangan mikro mandiri terbesar di dunia serta berbagai lembaga keuangan mikro lainnya (2002:103). Dengan melihat potensi besar tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Pebruari 2005 menindaklanjuti dengan

mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia (PINBUK, 2006:1)

Yang menarik dari sekian perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia adalah kemunculan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT lahir ditujukan untuk mengakomodasi keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan membumikan prinsip-prinsip ekonomi syariah bagi masyarakat (Mafruhah, 2002). Sebagaimana dikatakan Adiwarmanto Karim, fenomena BMT di Indonesia menjadikan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia berbeda dengan negara lain (Warta BMT, 2005). Ia merupakan gerakan dari bawah (*bottom-up*) dalam menumbuhkan mobilisasi dana masyarakat. BMT tumbuh dan berkembang di Indonesia serta mampu beroperasi secara menguntungkan tanpa bantuan atau *intervensi* pemerintah. BMT juga berperan dalam mengembangkan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan yang relatif murah dan mudah dijangkau oleh mayoritas usaha kecil yang tidak *bankable*. Salah satu studi yang meneliti dampak krisis ekonomi terhadap kinerja keuangan BMT justru menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja keuangan meskipun perekonomian makro sedang dilanda krisis (Suharyani, 1999). Krisis tersebut membuka peluang bagi BMT untuk meningkatkan mobilisasi dana mengingat adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan lembaga keuangan syariah.

BMT sebagaimana lembaga-lembaga ekonomi yang menerapkan prinsip syariat Islam, lahir bersamaan dengan semakin bergairahnya kaum muslimin untuk kembali ke ajaran Islam. Dan sekarang lebih dari 3.000 BMT

tersebar di seluruh nusantara, dengan asset (konsolidasi) lebih dari satu triliun rupiah, dengan jumlah pengelola lebih dari 20.000 orang, hampir setengahnya S-1 dan wanita. BMT melayani lebih dari dua juta penabung, dan memberikan pinjaman pada lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil (PINBUK, 2006:1). Dengan prestasi tersebut, BMT sebenarnya bisa menjadi alternatif pemecahan masalah ekonomi yang strategis. Bila perkembangannya didukung optimal maka kemungkinan permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi.

Dari sisi lain, kapasitas BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana. Karena merupakan gerakan dari bawah, keberadaan BMT di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan untuk terus berkembang dengan baik. Sehingga fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa BMT berjalan tidak baik bahkan tidak sedikit mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya manajemen yang kurang baik, pengelolaan yang tidak amanah dan profesional, tidak dipercaya masyarakat, kesulitan modal dan beberapa sebab lain.

Salah satu studi yang berkaitan dengan kinerja lembaga keuangan mikro dapat menjadi perbandingan. Studi ini meneliti tentang kinerja dan kelangsungan lembaga keuangan mikro yang disubsidi (Schreiner,1997). Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan mikro dapat membantu orang-orang miskin dalam jangka waktu yang lama bila mampu berkinerja dengan baik dan menjaga kelangsungannya. Berfungsi

dengan baik dan berkelanjutan menggambarkan bahwa sebuah lembaga keuangan mikro dalam kategori sehat.

Dalam menilai tingkat kesehatan, semua lembaga keuangan yang beroperasi sebagaimana bank mengacu pada parameter kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan adalah ukuran kinerja dan kualitas usaha dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan kelangsungan usaha, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kesehatan ini berupa penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap faktor-faktor CAMEL (*Capital adequacy, Asset Quality, Management Earning, dan Liquidity*). Kelima aspek tersebut adalah: Modal; Kualitas Produktif; Manajemen; Rentabilitas; dan Likuiditas (CAMEL). Namun untuk menilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan standar penilaian sendiri.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan lembaga sangat penting agar tetap terjaga kelangsungan hidup dan berfungsi dengan baik sebuah BMT sebagai lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu perlu diadakan sistem manajemen yang baik dan terarah demi tercapainya lembaga keuangan mikro yang sehat. Sehubungan dengan pengembangan ekonomi Islam berbasis kerakyatan, penulis memandang penting untuk mengadakan penelitian dengan judul, “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BMT UMS DENGAN METODE CAMEL”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesehatan BMT UMS di Universitas Muhammadiyah Surakarta apabila dilihat dari aspek Modal, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas (metode CAMEL).

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan pada BMT UMS dengan pertimbangan asset yang yang dihimpun dari masyarakat mencapai lebih dari tiga milyar rupiah. Sehingga perlu bagi peneliti untuk mengkaji aspek kesehatannya.
2. Penelitian ini dibatasi pada analisis laporan keuangan BMT UMS selama dua periode yaitu dari tahun 2004 hingga 2005.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat kesehatan BMT UMS dengan menggunakan metode CAMEL.
2. Untuk mengetahui kinerja BMT UMS dalam mengambil kebijakan keuangan, dengan standar penilaian tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (SK Menkop. No. 194/KEP/M/IX/1998).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi BMT UMS, sebagai tolak ukur bagi para pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan arah pengembangan BMT UMS ke depan.

2. Bagi para nasabah dan investor, dari penelitian ini nasabah dan investor dapat menyalurkan harapannya untuk memperoleh kepastian kondisi dalam berinvestasi di BMT.
3. Bagi dunia pengembangan ilmu manajemen keuangan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Lembaga Keuangan Mikro
- B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- C. Laporan Keuangan
- D. Penilaian Tingkat Kesehatan
- E. Analisis CAMEL

F. Hasil Penelitian Terdahulu

G. Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

B. Jenis dan Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

B. Pengujian Hipotesis

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Implikasi

C. Saran-Saran